

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Modalitas

Pada dasarnya sebuah pemilihan umum sendiri merupakan sebuah arena kandidasi politik yang diikuti sederetan partai politik beserta juga dengan para kandidat-kandidatnya, dan untuk memenangkan Pemilu diperlukan perolehan suara terbanyak untuk mengalahkan calon kandidat lainnya. Pemilu juga sangat bergantung pada posisi partai dan kandidatnya, kedua aspek tersebut harus berkesinambungan yang mana tidak bisa hanya mengandalkan salah satu aspek seperti popularitas dari partainya saja melainkan harus dengan popularitas dari kandidatnya. Hal tersebut diperlukan agar sang kandidat mendapatkan suara sebanyak mungkin dan memenangkan Pemilu. Secara konseptual hal di atas dapat digambarkan sebagai wujud dari tiga modal utama yang perlu dimiliki oleh para calon kandidat yang hendak mengikuti Pemilu yaitu modal politik (*politic capital*), modal sosial (*social capital*), dan modal ekonomi (*economical capital*) (Marijan, 2010). Sehingga dengan beberapa kriteria tersebut maka calon kandidat yang akan mengikuti kontestasi politik akan mampu mempengaruhi calon pemilih di dalam proses kandidasi politik di suatu Negara ataupun di daerah tertentu, hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan kepercayaan dari pemilih dan masyarakat. Modalitas dari figur politik saja tidak cukup, harus didukung oleh faktor ekonomi, partai, dan elit politik dibelakangnya (Muliade & Ubaidullah, 2022).

Modal secara fundamental dapat dibagi menjadi empat kategori. Modal yang dibutuhkan oleh calon kandidat sebagai kekuatan dalam proses kontestasi politik untuk meraih kekuasaan dan dapat mempengaruhi pemilih dapat dibagi menjadi empat faktor. Pertama, modal ekonomi yang mencakup uang, harta kekayaan pribadi, kelompok, serta asset yang dimiliki. Kekuatan ekonomi ini yang harus dimanfaatkan kandidat untuk mempengaruhi pemilih baik yang rasional maupun yang irasional. Kedua, modal sosial yang dapat berupa hubungan dengan individu lain, aktor ataupun elit politik di tingkat lokal hingga nasional, dan juga jaringan yang luas dan kuat di dalam suatu partai politik ataupun kelompok kepentingan. Ketiga, modal kultural, yang bisa berupa pengetahuan yang luas dan mendalam tentang kenegaraan, kualifikasi pendidikan, dan kemampuan berbahasa. Terakhir, modal simbolik yang mencakup prestise yang diwariskan, kehormatan keluarga, dan posisi di masyarakat. Keempat modal tersebut merupakan faktor penting seorang kandidat dalam memenangkan kontestasi politik (Wance & Djae, 2019).

Menurut Bourdieu (dalam Richardson, 1986) membagi modal menjadi tiga jenis. Pertama, modal ekonomi, yang terdiri dari aset materi maupun uang, baik berupa bentuk kekayaan yang tidak bergerak ataupun yang bergerak, yang juga memiliki nilai simbolis. Kedua, modal budaya, yang meliputi nilai dari budaya yang sudah lama terbentuk di masyarakat, termasuk pola konsumsi. Modal budaya juga melingkup kekayaan seperti berbentuk properti yang dimiliki dan berperan penting dalam membentuk suatu pola budaya politik, dan juga dapat berupa pengetahuan pendidikan yang dimiliki, serta penggunaan Bahasa yang

terpolarisasi di kelompok tertentu. Menurut Bordieu, modal berfungsi sebagai hubungan sosial yang dapat membantu menciptakan jaringan yang luas, memungkinkan pertukaran materi atau simbolik, yang pada akhirnya mempresentasikan sebuah kekuatan politik dalam formasi sosial tertentu.

Modal harus hadir dalam suatu ranah agar ranah tersebut memiliki makna. Namun, hal tersebut bisa dijelaskan dari perspektif lain dengan menggunakan pendekatan generatif. Meski penjelasan ini agak bersifat artifisial, tetap bermanfaat. Hubungan antara habitus, modal, dan ranah bersifat langsung. Nilai modal berkaitan erat dengan karakteristik budaya dan sosial dari habitus. Ranah dikelilingi oleh relasi kekuasaan objektif yang berakar pada basis material. Beragam jenis modal yang ada dalam suatu ranah tertentu dan yang terintegrasi dalam habitus sebagian dihasilkan dari basis material tersebut. Bourdieu juga melihat modal sebagai dasar dominasi. Berbagai jenis modal bisa ditukar dengan modal yang lain, menunjukkan bahwa modal memiliki sifat yang dapat dipertukarkan. Penukaran paling penting terjadi pada modal simbolik, karena dalam bentuk yang seperti inilah modal yang berbeda dapat dikenali dan dianggap sah. Untuk diakui sebagai individu atau kelas yang memiliki status dan prestise, seseorang harus dianggap sah. Posisi semacam ini memberi kekuasaan untuk menetapkan nama (baik aktivitas maupun kelompok), mewakili pendapat umum, dan yang terpenting, menciptakan "versi resmi" dari dunia sosial (Richardson, 1986).

Dalam proses pemilihan legislatif sebagai sebuah ajang kontestasi politik, di mana seluruh lapisan masyarakat bebas memilih calon manapun dan para

kandidat bersaing satu sama lain, kandidat yang memiliki peluang menang yang paling besar adalah kandidat yang memiliki modal yang kuat. Modal utama yang harus dimiliki oleh kandidat adalah modal sosial, politik, dan ekonomi. Calon legislatif yang memiliki banyak modal sudah pasti memiliki peluang yang besar dalam memenangkan pemilihan umum. Semakin besar akumulasi dari modal-modal tersebut akan menambah peluang menang dari calon kandidat untuk menang. Proses terpilihnya suatu calon tidak bisa hanya mengandalkan satu faktor atau modal saja melainkan akumulasi dari beberapa modal. Dalam konteks proses kontestasi politik, penulis ingin mengetahui tentang pemilihan legislatif Ratnawati menggunakan sebuah konsep modalitas, karena penulis menduga bahwasannya pemilihan legislatif dari Ratnawati kuat dipengaruhi oleh faktor modalitas yang mampu dimanfaatkan dengan efektif dalam pemilihan legislatif. Adapun beberapa jenis modalitas yang dapat dielaborasi sebagai berikut.

2.1.2 Modal Sosial

Modal sosial (*social capital*) merujuk pada sumber daya yang terletak pada hubungan antar individu, jaringan, dan institusi sosial yang dapat dimanfaatkan oleh individu (seseorang) ataupun kelompok untuk meraih suatu tujuan tertentu. Modal sosial mengacu pada dukungan yang diterima oleh seorang kandidat karena karakteristiknya yang menumbuhkan suatu interaksi sosial dan jaringan yang mendukungnya. Modal sosial seorang calon dapat diukur dari berbagai hal, seperti tingkat pendidikannya, latar belakang pekerjaannya, dan peran pentingnya di masyarakat, seperti sebagai tokoh agama, adat, atau pemimpin

organisasi profesional atau kepemudaan. Komponen-komponen ini sangat penting bagi setiap kontestan karena mereka berfungsi sebagai dasar untuk mendorong dukungan politik dan membangun modal sosial. Selain itu, seorang kandidat tidak boleh mengabaikan pentingnya menjalin hubungan sosial dengan orang-orang di masyarakat dan komunitas secara keseluruhan. Seorang kontestan dapat mendapatkan dukungan dari masyarakat akar rumput dengan berkunjung secara tidak resmi ke arisan, kelompok tani, nelayan, karang taruna, PKK, dan organisasi sosial lainnya. Untuk membuat kandidat dianggap sebagai perwakilan aspirasi masyarakat atau sebagai perwakilan untuk menyampaikan aspirasi mereka, kunjungan-kunjungan ini bertujuan untuk membangun kedekatan personal dan menumbuhkan kepercayaan publik.

Beberapa pakar mendefinisikan modal sosial dengan membaginya menjadi 2 kelompok. Pertama, menekankan pada pentingnya peran jaringan sosial (*social network*), dilain sisi kelompok ke dua menjelaskan bahwasannya modal sosial lebih menekankan kepada karakteristik (*traits*) yang melekat pada seorang manusia yang terlibat didalam suatu interaksi sosial (Wance & Djae, 2019). Menurut Bourdieu (dalam Asrawijaya et al., 2022) modal sosial adalah kumpulan sumber daya yang ada dalam dinamika masyarakat, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Modal ini dapat berupa kerja sama atau hubungan sosial antara individu atau keluarga dengan komunitas mereka. Dengan kata lain, seseorang dapat mendapatkan dukungan kolektif dari masyarakat melalui modal sosialnya. Seberapa luas dan berkualitas jaringan sosial yang dapat dibangun seseorang menentukan kekuatan modal sosialnya. Modal sosial terdiri

dari dua komponen utama, yang pertama adalah hubungan sosial yang dapat digunakan sebagai sumber daya untuk interaksi sebagai bentuk relasi sosial dan yang kedua modal sosial merupakan hal yang berkaitan satu sama lain, baik budaya, ekonomi, maupun bentuk modal sosial yang dapat berupa kekayaan sumber daya alam atau institusi lokal. Bourdieu melihat modal sosial sebagai aset yang dimiliki kelas dominan untuk mempertahankan solidaritas sosial dan mempertahankan posisi mereka dalam masyarakat. Bordieu (dalam Wance & Djae, 2019) juga mentafsirkan modal sosial sebagai suatu modal yang memiliki potensi besar bila dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu yang berasal dari jaringan sosial yang telah terlembaga dalam struktur negara, dan hubungan ini akan terus berlanjut dalam bentuk pengakuan timbal balik antara individu dan kelompok, serta antara kelompok dan negara. Pengakuan jaringan sosial ini berfungsi sebagai interaksi dua arah yang memperkuat keanggotaan kelompok dan memberikan dukungan kepada negara.

Robert Putnam (dalam Putri, 2018) menggambarkan modal sosial sebagai komponen penting di dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari jaringan, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan suatu individu dapat bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial membantu masyarakat bekerja sama dan mengurangi konflik. Konsep dasar adalah nilai-nilai bersama dan keanggotaan dalam jaringan. Hubungan antar individu yang didukung oleh norma dan keyakinan disebut modal sosial. Pengamatan empiris, bukan hanya definisi, harus digunakan untuk menentukan manfaat hubungan ini. Dalam konteks ini, modal sosial sangat terkait dengan partisipasi politik

dalam arti tradisional; namun, keduanya berfokus pada hubungan antarindividu, sedangkan partisipasi politik berfokus pada interaksi dengan lembaga politik. Itu disebut sebagai "keterlibatan sipil" oleh Putnam. Menurut teori modal sosial oleh Putnam, semakin sering kita berinteraksi dengan orang lain, semakin percaya kita pada mereka, dan sebaliknya. Kepercayaan sosial sangat terkait dengan keterlibatan masyarakat. Karena mereka dapat mempermudah kerjasama dan mengurangi biaya transaksi, norma membentuk kepercayaan sosial. Norma memerlukan reaksi timbal balik, juga dikenal sebagai *reciprocity*. Reaksi timbal balik seimbang melibatkan pertukaran yang setara, seperti memberikan hadiah kepada teman. Reaksi timbal balik umum adalah pertukaran yang berkelanjutan, seperti dalam persahabatan, di mana hadiah tidak selalu dibalas secara langsung tetapi dapat dilakukan pada waktu yang berbeda.

James Coleman (dalam Baharuddin & Purwaningsih, 2017) menggambarkan modal sosial dengan dua karakteristik utama pertama, merupakan bagian dari struktur sosial dan kedua, membuat tindakan individu lebih mudah dalam suatu struktur tersebut. Dalam konteks ini, modal sosial mencakup harapan dan kewajiban, informasi potensial, norma dan sanksi, hubungan otoritas, dan organisasi sosial yang dapat digunakan dengan benar untuk menciptakan kontrak sosial. Coleman juga membedakan perspektif ekonomis dan sosiologis, yang melihat modal sosial dalam konteks partisipasi publik.

Dari sudut pandang yang berbeda, North dan Olson (dalam Baharuddin & Purwaningsih, 2017) menekankan betapa pentingnya ekosistem politik dan sosial sebagai komponen modal sosial karena lingkungan ini dapat membentuk norma untuk berkembang dan membentuk suatu struktur sosial. North dan Olson memfokuskan kepada peran suatu struktur yang lebih bersifat formal, seperti pemerintahan, rezim politik, hukum, dan sistem peradilan, serta kebebasan sosial maupun politik, sementara Putnam dan Coleman hanya berfokus pada hubungan horizontal dan vertikal.

Fukuyama (dalam Pantouw, 2012) Francis Fukuyama menekankan bahwa penelitian tentang kebajikan dan modal sosial membutuhkan kepercayaan (*trust*). Namun, dia mendefinisikan sebuah modal sosial (*social capital*) sebagai suatu kumpulan nilai atau norma tidak resmi yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok, yang memungkinkan mereka bekerja sama satu sama lain. Fukuyama menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi cenderung mencapai visi dan misinya, sedangkan masyarakat dengan tingkat kepercayaan rendah, yang ditandai oleh kecurigaan, kekecewaan, dan kecemburuan di antara anggota-anggotanya, menghadapi kesulitan dalam membangun kerjasama. "Suatu masyarakat tanpa kepercayaan" mengacu pada situasi di mana tidak ada kepercayaan sama sekali. Seorang calon legislatif yang terpilih tanpa dukungan modal sosial yang kuat akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugas politik setiap hari.

Fukuyama membedakan teori modal sosial dari teori modal manusia. Kemampuan yang berasal dari kepercayaan masyarakat, baik dalam kelompok

kecil maupun komunitas yang lebih luas, dikenal sebagai modal sosial. Kepercayaan masyarakat dibentuk oleh jejaring dan hubungan sosial yang dibentuk oleh kelompok kecil ini (Wance & Djae, 2019). Kepercayaan ini kemudian menjadi bagian dari elemen kultural seperti agama, tradisi, dan sejarah. Modal sosial ini berasal dari kepercayaan yang luas dalam masyarakat, baik dalam kelompok terkecil seperti keluarga maupun dalam komunitas yang lebih besar, seperti negara, dan berbagai kelompok lainnya. Kepercayaan ini menunjukkan harapan bahwa anggota masyarakat akan bertindak secara konsisten, jujur, dan kooperatif sesuai dengan norma yang berlaku bersama (I. A. Putri, 2018).

2.1.3 Modal Politik

Menurut Kacung (dalam Ansar et al., 2021) modal politik dapat diartikan sebagai kekuatan atau dukungan yang diperoleh dari partai politik (koalisi partai). Modal politik dapat diartikan sebagai dukungan politik, baik dari rakyat itu sendiri ataupun dari kekuatan politik yang biasa dipandang sebagai representasi dari rakyat (Sadri et al., 2020). Selain dari partai politik dukungan politik bisa berasal dari kekuatan politik lain, misalnya seperti dukungan dari elit ataupun aktor lokal yang berasal dari organisasi sosial maupun politik. Dukungan ini diberikan kepada kandidat yang dianggap mampu mewakili kepentingan mereka dalam pemilihan legislatif. Dalam politik lokal, banyak elit lokal yang sudah menduduki kursi politik dan posisi strategis lainnya yang berperan penting serta memiliki pengaruh besar terhadap kelompok dan masyarakat di wilayah mereka. Partai politik mungkin tidak memiliki banyak

manfaat sebagai alat untuk mendapatkan dukungan. Akibatnya, pengaruh personal dari figur kandidat yang sudah menduduki jabatan politik lebih dominan dalam kompetisi politik, sehingga kandidat yang sedang dalam kontestasi politik harus memanfaatkan jaringan organisasi politik yang luas untuk mendapatkan dukungan.

Casey dikutip (Baharuddin & Purwaningsih, 2017), Modal politik didefinisikan sebagai pemanfaatan seluruh jenis sumber daya yang dimiliki oleh seorang aktor politik atau lembaga politik untuk menciptakan kebijakan politik yang dapat menguntungkan dan memperkuat posisi mereka. Jumlah modal politik yang dimiliki oleh elit politik atau lembaga politik dipengaruhi oleh empat jenis pasar politik. Pasar politik terpenting adalah Pemilu, yang merupakan cara utama untuk memilih pemimpin di dalam sistem demokrasi. Pasar politik kedua adalah proses perumusan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Pasar politik ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara aktor politik dan lembaga politik selama proses pelaksanaan dan perumusan kebijakan publik. Pasar keempat merupakan opini masyarakat terhadap aktor politik ataupun dari lembaga politik tersebut.

Seid dan Whitely (dalam Azhima, 2015) mengatakan modal politik adalah seberapa sah dan dapat dipercaya sebuah lembaga, yang didasarkan pada kepercayaan masyarakat, rasa hormat, dan legitimasi lembaga dalam sistem politik. Modal politik dapat dianggap sebagai jenis modal sosial yang berbeda. Ini bekerja antara masyarakat dan pemerintah secara vertikal, tidak seperti modal sosial yang bekerja dalam masyarakat. Keterlibatan politik membentuk

modal politik, seperti halnya jaringan hubungan sosial membentuk modal sosial. Menurut Lopez (dalam Azhima, 2015), modal politik dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua komponen: politik perwakilan, yang berkaitan dengan legitimasi atau dukungan konstituen, dan politik reputasi, yang berkaitan dengan kemampuan politik individu.

Menurut J.A. Booth dan P.B. Richard (dalam Mbolang et al., 2020), pakar politik, modal politik adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan. Modal politik adalah berbagai sumber daya yang diberikan untuk mewujudkan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan, menurut A. Hick dan J. Misra (dalam Mbolang et al., 2020). Pada dasarnya, modal politik adalah kekuatan yang dimiliki seorang individu yang dapat digunakan atau berkontribusi pada keberhasilannya dalam kontestasi politik, seperti Pemilu.

Dukungan politik dari masyarakat dan kekuatan politik yang dianggap mewakili rakyat sangat penting, menurut Marijan (Ansar et al., 2021). Dukungan ini sangat diperlukan calon kandidat yang ingin ikut serta dalam pemilihan umum, baik selama pemilihan legislatif maupun selama pemilihan itu sendiri.

Menurut Birner dan Witmer (dalam Ananda & Valentina, 2021), konsep modal dimasukkan ke dalam konteks politik, yang memungkinkan untuk memeriksa bagaimana masyarakat memanfaatkan modal sosial untuk mencapai tujuan politik. Masyarakat lokal terlibat dalam berbagai aktivitas politik, termasuk mobilisasi pemilih, partisipasi langsung dalam proses legislasi, protes

atau demonstrasi, lobi, dan membangun wacana politik untuk memperkuat demokrasi. Oleh karena itu, modal sosial diubah menjadi modal politik untuk digunakan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Modal sosial ini berkembang menjadi modal politik, yaitu kekuatan ekonomi dan kemampuan melobi yang mendukung lobi politik.

Menurut Field (dalam Indira & Mariyah, 2021), modal politik adalah penggunaan semua bentuk modal oleh seorang aktor ataupun lembaga politik untuk melakukan tindakan politik yang dapat menguntungkan mereka atau memperkuat posisi mereka. Selain mendapatkan dukungan dari partai politik, seorang calon legislatif juga harus mendapatkan dukungan dari para politisi yang berpengaruh. Sørensen dan Torfing (dalam Indira & Mariyah, 2021) menyatakan bahwa modal politik mencakup kemampuan seseorang untuk bertindak secara politis, yang diperoleh melalui keterlibatan dalam suatu proses politik. Akibatnya, seorang calon anggota legislatif harus mendapatkan dukungan dari partai politik, dan dukungan dari elit politik dapat sangat memengaruhi keputusannya untuk dipilih.

Pemilihan umum berfungsi sebagai tempat untuk memilih politisi yang akan memimpin pemerintah. Elit politik harus memiliki keuntungan tertentu. Setiap pasangan kandidat yang diusung dan didukung oleh partai politik atau koalisi partai memiliki perbedaan dalam perolehan kursi dan suara dalam Pemilu legislatif. Beberapa pasangan kandidat bahkan menerima dukungan yang signifikan dari partai politik. Meskipun partai dominan mendapatkan dukungan suara, hal itu tidak menjamin kemenangan dalam Pemilu karena persaingan

antar partai atau koalisi partai tidak terlalu mencolok dan pengaruh figur kandidat lebih menentukan.

Para kontestan tidak hanya membutuhkan dukungan dari partai politik, mereka juga membutuhkan dukungan dari para politisi lokal yang memiliki kekuatan dan memainkan peran penting dalam bidang politik dan lainnya. Calon kepala daerah harus menunjukkan kompetensi pribadi seperti posisi strategis dalam partai politik dan pemerintahan sehingga elit mendukung kandidat yang dianggap unggul. Mereka yang memenuhi kriteria seperti ketokohan, kompetensi, popularitas, kapabilitas, dan integritas termasuk moralitas masyarakat biasanya mendapatkan dukungan dari elit partai. Karena banyak orang berpendapat bahwa politik tidak memiliki "makan siang gratis", dukungan ini seringkali berasal dari lobi politik yang mempertimbangkan kekayaan kandidat dan elektabilitas mereka (Mbolang et al., 2020).

Karena dalam politik praktis, setiap kandidat harus menyiapkan sumber daya yang memadai, baik internal maupun eksternal, yang terus berkembang, calon legislatif hampir pasti akan kalah jika mereka tidak memiliki dukungan dari elit partai politik. Dalam kompetisi politik, kemenangan tidak dapat diprediksi, sehingga setiap peserta harus memastikan bahwa sistem partai politik dan seluruh jaringannya berfungsi dengan baik untuk membantunya (Mbolang et al., 2020).

2.1.4 Modal Ekonomi

Modal ekonomi memainkan peran penting sebagai suatu bentuk penggerak utama bagi mesin politik dalam konteks persaingan politik seperti pemilihan

legislatif dan kepala daerah. Misalnya, biaya politik yang signifikan terkait dengan logistik, spanduk, iklan, dan menggunakan konsultan politik, selama masa kampanye. Bahkan calon yang tidak berasal dari partai politik yang mencalonkannya seringkali harus memiliki modal finansial. Modal ekonomi dapat didefinisikan sebagai aset yang memiliki nilai ekonomis dan biasanya diwakili oleh uang atau mata uang. Dari sudut pandang ekonomi, modal dapat diartikan sebagai investasi terhadap pihak lain dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam bentuk barang politik, uang, atau jasa.

Menurut Bourdieu (Mbolang et al., 2020), modal ekonomi dapat dengan mudah dikonversikan menjadi uang dan dilembagakan dalam bentuk hak kepemilikan. Namun, dalam situasi tertentu, modal budaya juga bisa diubah menjadi modal ekonomi, seperti melalui kualifikasi pendidikan. Begitu pula, modal sosial dalam beberapa kondisi bisa diubah menjadi modal ekonomi dan dilembagakan, misalnya dalam bentuk gelar akademik. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, jenis modal yang paling terbatas adalah modal ekonomi, yang terbatas pada bentuk material seperti uang, hak milik, dan kekayaan. Namun, Bourdieu (dalam Najib Yuliantoro, 2016) berpendapat bahwa modal ekonomi lebih mudah dikonversi ke modal imaterial karena sifatnya yang material. Konvertibilitas ini digunakan oleh modal ekonomi untuk mengambil posisi tertentu di lingkungan tertentu, menjamin reproduksi modal tetap berjalan, dan, dalam beberapa kasus, menentukan hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Reproduksi dan transfer modal ekonomi ke modal lain sangat intensif dan berakar kuat. Modal ekonomi mengacu pada sebuah

dukungan ekonomu berupa uang yang berasal dari calon, partai politik, atau pihak lain. Calon legislatif dalam kontestasi pemilu juga memerlukan dukungan dari aktor ekonomi atau donatur lainnya.

Ahli ekonomi John Stuart Mill dalam *Principles of Political Economy* (1848) seperti dikutip (dalam Baharuddin & Purwaningsih, 2017) mendefinisikan "*capital*" dengan dua pengertian: (1) barang fisik yang digunakan untuk memproduksi barang lain, dan (2) dana yang tersedia untuk membayar tenaga kerja. Pada akhir abad ke-19, modal dalam bentuk barang fisik ini dianggap sebagai salah satu dari empat faktor utama produksi, bersama dengan tanah, tenaga kerja, dan organisasi atau manajemen. Para ahli ekonomi neo-klasik sering menggunakan perspektif ini misalnya Alfred Marshall (dalam Pantouw, 2012). Modal dalam konteks ekonomi seringkali disamakan dengan pemikiran mengenai kapitalisme dengan segala perdebatan dan kontroversinya.

Proses pilkada yang sangat mahal menimbulkan tantangan bagi kemajuan demokrasi lokal, menurut Sahdan dan Haboddin (dalam Baharuddin & Purwaningsih, 2017). Ini disebabkan oleh fakta bahwa kandidat yang bersaing biasanya memiliki banyak uang. Tiga faktor utama memengaruhi tingginya biaya pilkada seperti, pasangan calon kepala daerah harus "membeli" dukungan partai politik sebagai alat politik, Calon memerlukan biaya besar untuk melakukan kampanye politik, dan Praktik politik sering menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilih. Sahdan dan Haboddin menyatakan bahwa "dana politik" diperlukan untuk setiap penyelenggaraan pilkada untuk membiayai berbagai kegiatan pilkada. Sumber dan penggunaan dana politik ini berbeda.

Dana politik berasal dari donasi simpatisan ataupun dari pasangan calon itu sendiri, baik individu maupun perusahaan. Selain itu, dana politik dapat didefinisikan sebagai partisipasi masyarakat dan dukungan langsung terhadap pasangan calon kepala daerah. Dana politik dibagi menjadi dua kategori berdasarkan caranya digunakan: untuk kampanye dan untuk aktivitas sehari-hari partai politik. Dalam kampanye politik, pasangan calon menggunakan dana politik untuk berbagai tujuan. Ini tidak hanya mencakup pengeluaran untuk brosur, konvoi, konsumsi, transportasi, kaos, poster, dan iklan, tetapi juga untuk membayar partai politik yang digunakan sebagai alat politik mereka dan mendapatkan suara masyarakat (Pantouw, 2012).

Modal ekonomi merupakan dukungan keuangan untuk tujuan politik, yang dapat berasal dari dana pribadi atau donatur. Dana tersebut digunakan untuk partai politik, kampanye, dan pembelian suara untuk menang dalam pemilihan. Dalam situasi politik yang mengutamakan komunikasi cepat antara pemilih dan calon politik, modal ekonomi dan politik sangat terkait. Modal ekonomi seringkali digunakan sebagai jalan pintas karena tidak cukup waktu untuk memperkenalkan diri sebagai calon politisi. Fenomena ini banyak terjadi di negara berkembang, di mana pemilihan yang lebih rasional dan sistem pemilih yang lebih rasional sedang diterapkan.

2.1.5 Modal Budaya

Modal budaya dibangun sejak lahir dan terinternalisasi melalui didikan orang tua dalam keluarga. Oleh karena itu, pendidikan formal dan nilai-nilai yang diwariskan dalam keluarga sangat mempengaruhi modal sosial yang

multidimensional. Proses pembentukan modal budaya ini terjadi baik secara sadar maupun tidak sadar, dan mereka berfungsi dengan baik sebagai bagian dari kehidupan sosial.

Bourdieu (dalam Najib Yuliantoro, 2016) mengatakan bahwa ada tiga jenis modal budaya. Pertama, itu internal atau personal, yaitu kebiasaan yang ada di dalam tubuh dan pikiran seseorang, seperti jujur, dermawan, atau tampan. Modal melekat pada individu hingga membentuk habitus, dan meskipun sulit diubah, tidak berarti tidak dapat ditransfer, ditukar, atau dijual, seperti halnya uang, hak milik, atau status kebangsawanan. Kedua, modal budaya objektif, yaitu hal-hal yang dianggap berharga secara budaya, seperti buku, lukisan, karya ilmiah, atau monumen, dapat diubah menjadi modal ekonomi. Dalam konteks produksi budaya, modal ini berfungsi dengan aktif dan efektif. Oleh karena itu, untuk memperoleh modal budaya individu, seseorang harus memiliki niat dan kemampuan untuk melakukannya. Ketiga, modal budaya institusional, yaitu peraturan yang memberikan jaminan sosial, seperti gelar akademik atau posisi politik. Kualifikasi formal, seperti gelar universitas, diakui dalam lembaga formal negara dan berfungsi sebagai standar budaya. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki, semakin banyak kebijaksanaan yang dapat diperoleh. Keempat, Kekayaan aset yang dimiliki, yang berperan besar dalam membentuk pola budaya politik, seperti pengetahuan pendidikan dan variasi bahasa yang terjadi dalam kelompok tertentu, adalah contoh modal budaya, menurut Bourdieu. Modal berfungsi sebagai relasi sosial yang membantu membangun jaringan luas untuk pertukaran, baik dalam bentuk

materi maupun simbol, untuk merepresentasikan kekuatan modal politik dalam struktur sosial tertentu. Bourdieu mengatakan bahwa kompetensi akademik dapat digunakan secara efektif untuk mengukur kemampuan budaya seseorang secara legal dan dapat diukur, serta memungkinkan pertukaran dan konversi antara modal budaya dan modal ekonomi, yang dapat menghasilkan keuntungan material dan simbolik. Menurut Johnson (dalam Zal & Zal, 2016) menyatakan bahwa modal budaya berfungsi sebagai aset dalam aktivitas ekonomi yang berbasis pada elemen budaya. Elemen seperti monumen, warisan budaya, dan lainnya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, terutama di bidang pariwisata. Penekanan pada modal budaya sebagai alat untuk kegiatan ekonomi adalah hal yang sama antara kedua perspektif tersebut. Selain itu, modal budaya didefinisikan dalam arti "kebudayaan", yang mencakup manifestasi budaya dan praktik budaya dalam sebuah komunitas. Di sisi lain, elemen budaya mencakup kedua aspek tersebut. Pengertian "budaya" sebagai representasi dari gaya hidup suatu komunitas diteliti lebih lanjut dalam sosiologi atau antropologi. Tidak hanya elemen budaya yang disimpan dalam bentuk tradisi, tetapi juga norma dan nilai yang lebih pragmatis dan kompleks.

Modal budaya dapat diperoleh jika seseorang memiliki habitus yang sesuai dalam kehidupannya, karena modal ini berperan dalam menciptakan kesetaraan atau ketidaksetaraan yang mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kelas sosial tertentu. Modal budaya memungkinkan seseorang untuk meraih peluang dalam kehidupan. Pemikiran Bourdieu sangat membantu memahami dan menganalisis kesenjangan sosial-

budaya, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat Indonesia. Modal budaya dan habitus membantu menjelaskan bentuk dan struktur budaya, yang sangat relevan di masyarakat Indonesia di mana ada pengakuan kelas sosial. Status sosial yang lebih tinggi cenderung lebih dihormati dan dikenal daripada status sosial yang lebih rendah.

Menurut konsep modal budaya di atas, modal budaya adalah nilai yang sudah ada sejak lahir dan ditanamkan dalam diri seseorang yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial. Tujuan modal budaya adalah kebiasaan untuk mempertahankan perilaku yang baik dan sopan santun antara sesama orang dan menjadi pedoman hidup. Modal budaya adalah konsep yang penting untuk memahami bagaimana aspek-aspek budaya berperan dalam menentukan posisi sosial individu dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa status sosial tidak hanya bergantung pada sisi materi saja, tetapi juga pada pengetahuan, keterampilan, dan pengakuan yang diperoleh melalui pendidikan dan interaksi sosial. Bourdieu menggarisbawahi bahwa modal budaya memainkan peran sentral dalam reproduksi sosial dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa modal budaya memiliki peranan dalam keterpilihan seorang caleg pada arena kontestasi politik.

2.1.6 Modal Simbolik

Modal simbolik adalah jenis modal yang tidak memiliki bentuk fisik dan seringkali berasal dari kesalahpahaman atau pengenalan yang salah, menurut Bourdieu (Najib Yuliantoro, 2016). Namun, modal ini diakui, diterima, dan bahkan dapat diubah menjadi modal lain. Selain itu, Bourdieu menekankan

bahwa modal simbolik melibatkan mediasi dan intervensi habitus. Dalam konteks sosial, modal simbolik beroperasi dalam ranah kognitif karena bergantung pada pengakuan seseorang oleh logika pengetahuan atau ketidakabsahan pengakuan tersebut. Dengan kata lain, modal simbolik sangat terkait dengan legitimasi status dan prestise dalam masyarakat. Dalam konteks modal ekonomi, sosial, dan budaya, itu berfungsi sebagai representasi legitimasi yang dihargai. Modal simbolik dapat berupa prestise yang diwariskan secara turun-temurun, kehormatan yang berasal dari orang tua, atau status sebagai tokoh penting, serta kharisma bawaan yang mampu mempengaruhi orang lain.

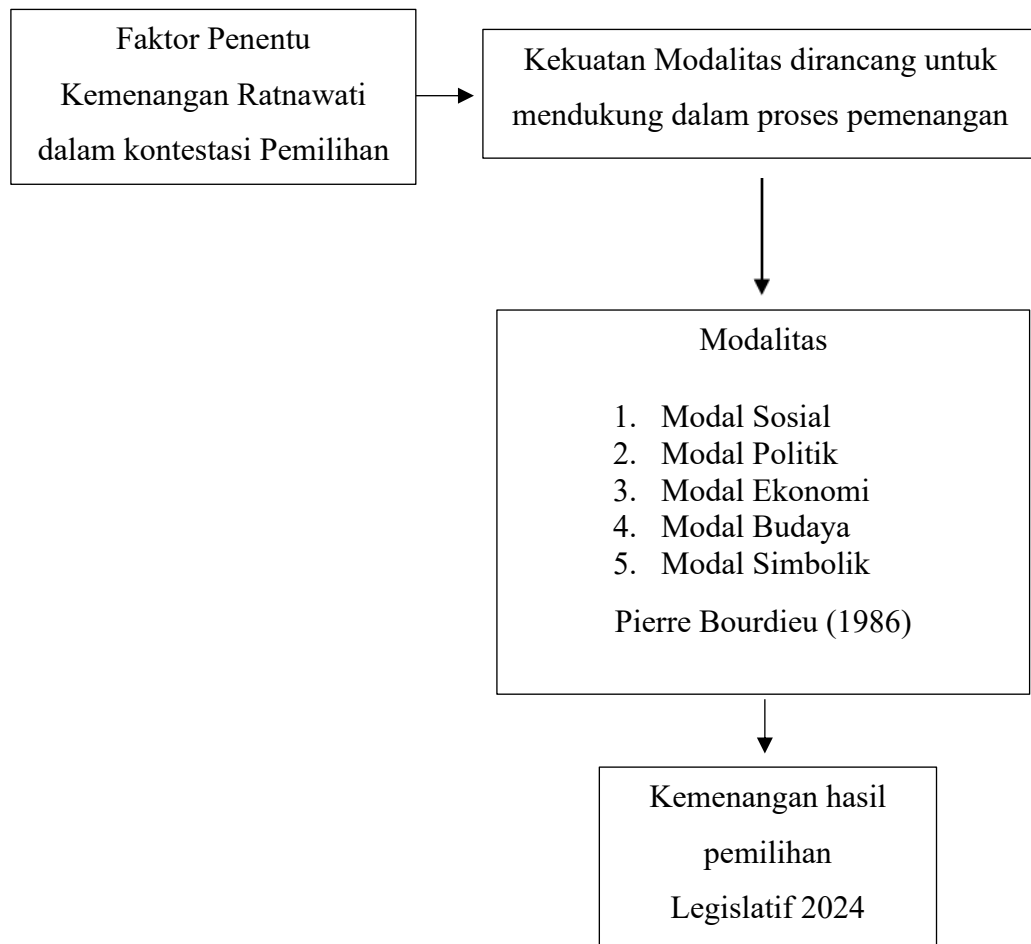
Selain itu, Bourdieu (Harker et al., 2009) menyatakan bahwa berbagai jenis modal dapat dipertukarkan, yang berarti bahwa modal memiliki sifat yang "dapat dipertukarkan". Karena berbagai jenis modal diakui dan dianggap sah dalam bentuk ini, pertukaran yang paling penting terjadi pada modal simbolik. Seseorang harus diterima sebagai hal yang sah, dan kadang-kadang sebagai otoritas, untuk dianggap sebagai individu atau kelas yang memiliki status dan prestise. Posisi ini memiliki "kekuasaan untuk memberi nama" (aktivitas, kelompok), "kekuasaan untuk mewakili pendapat umum", dan, yang paling penting, "kekuasaan untuk menciptakan "versi resmi dari dunia sosial". Modal simbolik mendukung posisi ini. Salah satu contoh paling menonjol dari kekuasaan ini adalah penerapan hukum dan kekerasan simbolik oleh negara untuk memaksakan tujuan tertentu. Negara melindungi semua jenis nominasi resmi, seperti hak kepemilikan, hak pendidikan, dan hak profesional. Identitas

yang diakui dan dikenal kemudian memberikan modal ekonomi dan budaya. Seorang ahli yang diakui oleh negara, seperti seorang dokter atau guru, menciptakan perspektif yang dapat memberikan hak-hak universal kepada mereka yang menerima sertifikat dan bertindak sesuai dengan standar masyarakat. Mereka berjuang untuk memperoleh visi yang sah, atau kekuasaan untuk memberi nama. Ini menghasilkan semacam konsensus yang dibangun tentang hubungan kekuasaan antara dua sistem asumsi ataupun sistem amatir dan ahli yang muncul dari struktur dan fungsi domain tersebut.

Modal simbolik adalah kunci untuk memahami bagaimana kekuasaan dan pengakuan beroperasi dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa status dan pengaruh tidak hanya didasarkan pada sumber daya materi, tetapi juga pada cara-cara di mana individu dan kelompok dihargai dan diakui oleh orang lain. Bourdieu menganggap modal simbolik sebagai salah satu komponen penting dalam analisis sosial, karena ia membantu menjelaskan dinamika kekuasaan yang lebih kompleks dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwasannya modal simbolik mempengaruhi keterpilihan calon legislatif pada arena kontestasi politik.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Seperti yang kita ketahui kerangka pemikiran digunakan untuk dapat memudahkan dalam pemahaman dari maksud dan tujuan sebuah penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini membahas tentang “KEKUATAN MODALITAS RATNAWATI DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DPRD PROVINSI JAWA BARAT 2024” sebagaimana yang sudah dijelaskan peneliti bahwasannya penelitian ini menarik untuk dibahas karena Ratnawati merupakan calon perempuan dengan perolehan suara terbesar ke 2 di Dapil 12 Jawa Barat mengalahkan caleg

incumbent dan bahkan artis, Ratnawati sendiri merupakan caleg pemula yang baru pertama kali mengikuti Pileg pada tahun 2024.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori terkait modal-modal seperti modal sosial, politik, ekonomi, kultural, dan simbolik. Dan teori-teori tersebut diambil dari beberapa ahli seperti Pierre Bourdieu, Robert Putnam, Casey, dan lain-lain. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui modal apa saja yang dimanfaatkan Ratnawati dalam memenangkan kontestasi politiknya dan penelitian ini juga akan melihat bagaimana sinergitas dan interaksi antara beberapa modal dari Ratnawati sendiri dalam pemenangannya.